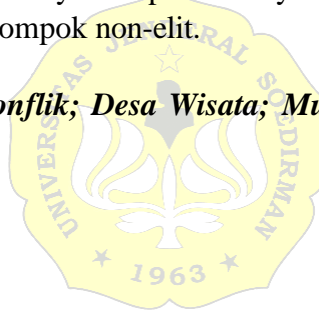


Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen konflik melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa wisata merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian desa. Desa wisata ini menarik perhatian dan menjadi arena baru perebutan sumberdaya ekonomi dan politik para elit lokal. Perebutan sumberdaya baru ini mendorong konflik antar elit yang menjadikan proses perkembangan desa wisata terganggu. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa konflik antar elit ini diselesaikan melalui musrenbang. Sehingga, musrenbang secara normatif tidak akan dikontrol dan dikuasai oleh para elit. Walaupun dalam realitanya, terjadi dominasi dari elit dalam proses musrenbang yang berakibat pada terpinggirkannya kelompok marginal yang partisipasinya semakin terbatas. Dengan demikian, musrenbang menjadi media yang dimanfaatkan para elit lokal untuk kepentingan ekonomi dan politiknya dan pada saat yang bersamaan musrenbang telah mengabaikan kepentingan kelompok non-elit.

Kata Kunci: *Manajemen Konflik; Desa Wisata; Musrenbang; Kebijakan Publik; Dominasi Elit*



Abstract

The purpose of this study is to determine conflict management through development planning meetings (musrenbang) in the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning the Empowerment of Tourism Villages in Banyumas Regency, Central Java. Tourism village is a form of community empowerment program and village economic development. The tourist village has attracted attention and become a new arena for local elites to compete for economic and political resources. The struggle for new resources has led to conflicts between elites that have disrupted the development process of tourist villages. Using a qualitative method with a case study approach, this research found that conflicts between elites were resolved through musrenbang. Thus, the musrenbang will normatively not be controlled and controlled by the elites. In reality, however, there is a domination of the elite in the musrenbang process, which results in the marginalization of marginalized groups whose participation is increasingly limited. Thus, musrenbang has become a medium used by local elites for their economic and political interests and at the same time musrenbang has ignored the interests of non-elite groups.

Keywords: *Conflict Management; Tourism Village; Musrenbang; Public Policy; Elite Domination*

